

SINOPSIS

Perdebatan antara Pemerintah Pusat Presiden SBY dengan Pemerintah DIY seputar terapan sistem yang harus dilakukan di DIY. Pemerintah Pusat menginginkan salah satu prinsip demokrasi presidensial dalam Pemilihan Umum yang bersifat "langsung" juga diterapkan di Provinsi DIY untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sama seperti yang dilakukan di setiap Daerah di Indonesia. Namun pandangan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat Yogyakarta yang tetap menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan adalah Sri Sultan dan Sri Paku Alam yang bertahta. Hal ini mendapat perhatian penuh dari DPRD Bantul selaku lembaga dewan perwakilan rakyat di Kabupaten Bantul untuk merespon secara positif keinginan rakyat yang diwakilinya melalui rapat paripurna DPRD Bantul untuk menyatakan sikap politiknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mencoba menganalisis bagaimana sikap politik DPRD Kabupaten Bantul terhadap RUUK DIY tahun 2010 pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek-subyek berdasarkan fakta sebagaimana adanya untuk diambil kesimpulan secara umum. Metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui sikap politik DPRD Kabupaten Bantul tahun 2010 terhadap RUUK DIY, maka dalam penulisan skripsi ini yang menjadi nara sumber adalah anggota DPRD atau ketua fraksi serta staff humas DPRD Bantul.

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap politik DPRD Kabupaten Bantul mendukung sepenuhnya keistimewaan DIY, terlebih pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan sikap masing-masing fraksi, enam dari tujuh fraksi yaitu fraksi PDI, Golkar, PAN, PKS, PPP dan Karya Bangsa mendukung melalui mekanisme penetapan, sedangkan fraksi partai Demokrat tidak bersikap. Hasil dari rapat paripurna tersebut kemudian disampaikan ke DPR-RI untuk dijadikan masukan bagi DPR-RI dalam mengesahkan RUUK DIY.

Oleh karena itu, untuk menjaga sikap politik DPRD Kabupaten Bantul terhadap RUUK terlebih pada pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, maka DPRD harus tetap memperjuangkan aspirasi rakyat sampai pada titik penghabisan. DPRD Kabupaten Bantul harus mampu mempertahankan sikapnya untuk tetap mendukung keistimewaan DIY, DPRD juga harus mampu menjadikan dan menjaga Yogyakarta tetap istimewa.